



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 3057/SEK/PENG.KP1.1.2/X/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN HAKIM
DARI JABATAN ANALIS PERKARA PERADILAN FORMASI TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Perkara Peradilan berdasarkan penetapan kebutuhan PNS tahun 2021 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengadaan Hakim.

I. JUMLAH KEBUTUHAN

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, seleksi Pengadaan Hakim ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dalam Jabatan Analis Perkara Peradilan Penetapan Kebutuhan CPNS tahun 2021 yang saat ini berjumlah 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu), untuk selanjutnya akan diseleksi menjadi Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

II. PERSYARATAN

1. Pegawai Negeri Sipil aktif Mahkamah Agung dalam jabatan Analis Perkara Peradilan sesuai penetapan kebutuhan pegawai tahun 2021;
2. Sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah;
3. Tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh dokter dari unit kesehatan pemerintah;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, atau tidak sedang dalam pemeriksaan karena pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Badan Pengawasan yang diajukan oleh peserta melalui email suratketerangan.bawas@gmail.com;
5. Tidak sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua/Kepala Satuan Kerja peserta.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> mulai tanggal 28 Oktober 2023 dan ditutup pada tanggal 1 November 2023 pukul 23:59 WIB dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) peserta;
2. Setelah melakukan pendaftaran, peserta kembali *login* ke portal <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan untuk memilih hakim sesuai lingkungan peradilan yang dilamar serta melengkapi data dan *form* yang tersedia;
3. Apabila telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, peserta dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan peserta

Peserta wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikeluarkan mulai tanggal 27 Oktober 2023;
2. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit kesehatan pemerintah yang dikeluarkan mulai tanggal 27 Oktober 2023;
3. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin, atau Tidak Sedang dalam Pemeriksaan dari Badan Pengawasan;
4. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Satuan Kerja.

IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Merupakan proses verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah peserta berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada Pengumuman ini;

2. Seleksi Psikotes

Peserta yang dapat mengikuti tahapan Psikotes adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, merupakan seleksi untuk memperoleh gambaran kepribadian dan potensi peserta, dengan bobot nilai 25% (dua puluh lima persen);

3. Seleksi Substansi Hukum

Seleksi Substansi hukum adalah seleksi untuk mendapatkan gambaran pengetahuan peserta terhadap hukum formil dan hukum materiil.

- a. Peradilan Umum: hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum pidana.
- b. Peradilan Agama: hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama dan hukum islam.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara: hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum administrasi negara.

Seleksi Substansi Hukum akan dilaksanakan melalui serangkaian ujian menggunakan sarana teknologi informasi atau metode lainnya yang ditetapkan Panitia Pelaksana, dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen);

4. Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara adalah seleksi untuk mendapatkan konfirmasi terhadap pengetahuan substansi hukum dari peserta yang dilakukan oleh Tim Pewawancara yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana, dengan bobot nilai 35% (tiga puluh lima persen);

5. Penetapan Kelulusan

Peserta Seleksi dinyatakan lulus apabila jumlah nilai pada seluruh tahapan seleksi memenuhi *passing grade* yang telah ditetapkan, adapun *passing grade* yang ditetapkan adalah 80 (delapan puluh).

V. JADWAL SELEKSI

Jadwal seleksi Pengadaan Hakim Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
TAHAPAN PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN		
1.	Pengumuman Seleksi	27 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	28 Oktober s.d 1 November 2023
TAHAPAN SELEKSI		
3.	Seleksi Administrasi	29 Oktober s.d 6 November 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 November 2023
5.	Pelaksanaan Seleksi Psikotes	13 s.d. 17 November 2023
6.	Pelaksanaan Seleksi Substansi Hukum	4 Desember s.d. 7 Desember 2023
7.	Pelaksanaan Seleksi Wawancara	18 s.d. 21 Desember 2023
8.	Pengumuman Kelulusan	29 Desember 2023

Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui *website* <https://mahkamahagung.go.id>, dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>.
2. Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

VI. LAIN-LAIN

1. Peserta harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Peserta hanya dapat mendaftar pada satu lingkungan peradilan;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-

- undangan terkait Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi peserta yang tidak hadir, atau tidak mengikuti tahapan seleksi, maka dinyatakan gugur;
 5. Apabila di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data peserta tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan;
 6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
 7. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
 8. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh peserta menjadi milik panitia;
 9. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>;
 10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan Hakim Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi *helpdesk* melalui *WhatsApp* : +62 813 9301 3103 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 11. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi Pengadaan Hakim Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan melalui **Whistleblowing System** Mahkamah Agung RI, dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Jakarta, 25 Oktober 2023

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Sugiyanto